

Judul : Komisi IV: evaluasi impor garam industri
Tanggal : Jumat, 24 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kejar Target Swasembada 2027

Komisi IV: Evaluasi Impor Garam Industri

ANGGOTA Komisi IV DPR Daniel Johan mengapresiasi pencapaian target swasembada garam nasional pada 2027 oleh Pemerintah. Meski begitu, tingginya angka komoditas impor harus segera diatasi dengan tindakan nyata di lapangan. Agar sasaran besar bisa dicapai secara maksimal serta memberi dampak luas bagi petambak.

Dia meminta Pemerintah membuktikan komitmen pencapaian swasembada garam lewat kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri. "Psalnya, impor garam industri sepanjang Januari-Mei 2026 tercatat mencapai 936 ribu ton atau melonjak 13,1 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya," terangnya, Selasa (21/7/2026).

Potensi produksi garam nasional, sambung Daniel, harus dioptimalkan termasuk dengan menjaga lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi. Indonesia saat ini memiliki sekitar 33.216,06 hektare lahan tambak garam yang mampu jadi modal utama untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan dalam negeri

secara mandiri.

Selain menjaga luas lahan, peningkatan kualitas garam domestik juga harus difokuskan agar produk lokal mampu memenuhi standar industri. Pemerintah wajib mendorong teknologi pemurnian garam di tingkat petambak. "Agar hasil produksi dalam negeri bisa bersaing, baik secara mutu maupun harga pasar," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menambahkan, penguatan sektor garam nasional membutuhkan dukungan penuh infrastruktur, teknologi pemurnian, kelembagaan petambak, dan jaminan kontinuitas pasokan. Pemerintah harus hadir menyelesaikan berbagai hambatan akibat iklim itu, sekaligus mengambil langkah tegas untuk mengendalikan laju masuknya komoditas impor.

Kenaikan impor garam industri pada awal tahun ini, kata dia, tidak boleh jadi respons otomatis atas tambahan permintaan sektor industri. Pemerintah wajib mengevaluasi setiap rencana pasokan luar negeri berdasar kebutuhan riil, stok ketersediaan, kapasitas produksi lokal, mutu barang, serta daya



Daniel Johan

serap terhadap hasil petambak.

Selanjutnya, kebijakan pembatasan impor barang luar negeri perlu dibarengi aturan tegas yang mewajibkan para importir maupun industri pengguna untuk menyerap garam produksi dalam negeri. "Tanpa kepastian pasar bagi petambak lokal, upaya peningkatan produksi dan kualitas komoditas nasional akan sulit berjalan secara konsisten serta berkelanjutan," ingatnya.

Menyikapi target swasembada garam pada 2027, DPR meminta Pemerintah memastikan

kebijakan impor, peningkatan mutu, penguatan produksi, serta perlindungan petambak berjalan secara terintegrasi. Langkah impor sebaiknya hanya dilakukan secara selektif demi memenuhi kebutuhan pasokan spesifik yang belum dapat dipenuhi oleh hasil produksi dalam negeri.

Apabila melihat besarnya potensi kekayaan alam wilayah pesisir, Indonesia sangat berpeluang besar jadi negara utama penghasil garam mandiri. "Pencapaian target itu kini membutuhkan kemauan politik serta keseriusan penuh dari Pemerintah dalam menempatkan komoditas garam sebagai skala prioritas utama agenda swasembada nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada garam secara penuh pada 2027. Penerapan target itu diharapkan bisa segera mengakhiri ketergantungan panjang Indonesia terhadap impor garam dari luar negeri yang telah berlangsung selama 80 tahun.

Untuk mencapai sasaran itu,

sejumlah langkah strategis disiapkan. Meliputi revitalisasi tambak milik masyarakat serta pengembangan kawasan produksi di Indonesia Timur, khususnya wilayah Rote, Nusa Tenggara Timur. "Pemerintah juga memanfaatkan potensi PLTU melalui kerja sama dengan PT Garam karena limbah operasinya mampu menghasilkan garam berkualitas tinggi," jelasnya.

Hasil perhitungan Pemerintah menunjukkan, estimasi potensi produksi garam dari tambak milik masyarakat diperkirakan dapat mencapai sekitar 2,5 juta ton. Total pasokan garam itu ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri pangan nasional serta kebutuhan sektor industri Chlor Alkali Plant (CAP).

Sedangkan kawasan produksi garam di Rote disiapkan secara khusus untuk menghasilkan sekitar 550 ribu ton pasokan garam kriteria farmasi. "Lewat kapasitas produksi itu, Pemerintah optimis seluruh kebutuhan garam sektor farmasi nasional sudah bisa terpenuhi dari dalam negeri," tandasnya. ■ PYB